TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM DI KABUPATEN PASER



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Administrasi Publik

Disusun Oleh :

FIRHANSYAH

NIM. 530036963

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2023

UNIVERSITAS TERBUKA
SEKOLAH PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Paser adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Samarinda, 25 Juli 2023
Yang Menyatakan



Firhansyah
NIM. 530036963

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS FULFILLMENT THE BASIC NEEDS OF DRINKING WATER IN PASER DISTRICT

Firhansyah
firhanulppaser@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Of the two types of basic services in the implementation of the Minimum Service Standards (MSS) policy in the field of Public Works, the achievement of implementing the MSS for meeting the basic needs of daily drinking water in Paser Regency is relatively lower. For this reason, it is necessary to explore the extent to which the implementation of the policy implementation process follows the applicable technical standards from the Ministry of Public Works and Public Housing, as well as from the regulations issued by the Regional Government of Paser Regency itself. This study also aims to identify the factors that support and hinder the implementation of MSS policies, especially the drinking water sub-sector. This research approach uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques of Observation, Interview and Document Study. The results show that the indicators that have been set in the relevant Ministerial Regulation concerning the MSS of Technical Standards of Public Works and Public Housing are used as a reference to assess the extent to which the process of implementing the drinking water sub-sector of MSS has been carried out by the Public Works and Spatial Planning Office of Paser Regency at each stage starting from Data Collection, Needs Calculation, Planning Preparation, to Implementation of Fulfillment. Supporting and inhibiting factors are identified from the use of the Meter & Horn policy implementation model (1975) with six variables. From the results of data analysis, it was found that the process of implementing the SPM policy in the drinking water sub-sector was still not in accordance with technical standards because the basic data used in calculating service needs did not yet refer to the Susenas data of local BPS, and there was no setting of priorities and targets for the implementation of MSS. The identified supporting factors include: Standards and policy objectives, budget support, internal and external communication of the organization, the suitability of the duties and functions of the DPUTR in the field of Human Settlements (organizational characteristics), positive responses and support from the community, a fairly conducive political situation, support (responses) full of implementors/employees, and the level of tendency of the implementors is quite high and positive. Meanwhile, the inhibiting factors include the lack of number and competence of employees in the implementing organization (Department of Cipta Karya, DPUTR, Paser Regency), the unstable social and economic conditions of Paser Regency, and the lack of understanding of the implementor of the MSS policy in the drinking water sub-sector.

Key Words: Policy Implementation, Minimum Service Standards (MSS), Basic Needs, Drinking Water.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM DI KABUPATEN PASER

Firhansyah
firhanulppaser@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Dari dua jenis layanan dasar pada implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, capaian penerapan SPM Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Paser relatif lebih rendah. Untuk itu perlu ditelusuri sejauh mana pelaksanaan proses penerapan kebijakan tersebut mengikuti standar teknis yang berlaku baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun dari aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sendiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan SPM khususnya sub bidang air minum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri terkait tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana proses penerapan SPM sub bidang air minum telah dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser pada setiap tahapan dimulai dari Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana, hingga Pelaksanaan Pemenuhan. Faktor pendukung dan penghambat diidentifikasi dari penggunaan model penerapan kebijakan Meter & Horn (1975) dengan enam variabelnya. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa proses penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum masih belum sesuai dengan standar teknis disebabkan data dasar yang digunakan dalam menghitung kebutuhan pelayanan masih belum mengacu pada data Susenas BPS setempat, serta belum adanya penetapan prioritas dan sasaran penerapan SPM. Faktor pendukung yang teridentifikasi antara lain: Standar dan sasaran kebijakan, dukungan anggaran, komunikasi internal dan eksternal organisasi, kesesuaian tugas dan fungsi DPUTR bidang Cipta Karya (karakteristik organisasi), tanggapan dan dukungan positif masyarakat, situasi politik yang cukup kondusif, dukungan (tanggapan) penuh dari implementor/pegawai, serta tingkat kecenderungan implementor cukup tinggi dan positif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai di organisasi pelaksana (Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser), belum stabilnya kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Paser, serta masih minimnya tingkat pemahaman implementor kebijakan SPM sub bidang air minum.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebutuhan Pokok, Air Minum.

PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG

Judul TAPM	: Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Daerah Kabupaten Paser
Penyusun TAPM	: Firhansyah
NIM	: 530036963
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	: Sabtu/ 07 Oktober 2023

Menyetujui

Pembimbing II,

Dr. Obed Bida, S.Sos., M.PA.
NIP. 197411162002121002

Pembimbing I,

Dr. Delly Maulana, M.PA.
NIDN. 0414128101

Penguji Ahli

Prof. Dr. H. Haedar Akib, M.Si.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister,
Administrasi Publik
Pada Sekolah Pascasarjana

Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si
NIP. 197803242001122002

Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.
NIP. 196305091989031002

UNIVERSITAS TERBUKA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama	: Firhansyah
NIM	: 530036963
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	: Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Daerah Kabupaten Paser

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	: Sabtu/ 07 Oktober 2023
Waktu	: 15.30 – 17.00 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

	Tanda Tangan
Ketua Komisi Penguji Nama: Drs. Rusna Ristasa, M.Pd.	.....
Penguji Ahli Nama: Prof. Dr. H. Haedar Akib, M.Si.	.....
Pembimbing I Nama: Dr. Delly Maulana, M.PA.	.....
Pembimbing II Nama: Dr. Obed Bida, S.Sos., M.PA.	.....

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan bimbingan-Nya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul: "**Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Paser**" ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. TAPM ini merupakan prasyarat untuk menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.

Penyusunan TAPM ini tak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka (UT).
2. Muhammad Husni Arifin, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka (UT).
3. Dr. Hj. Rulinawati sebagai Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik dan Mengelola Program MAP pada FHISIP UT.
4. Dr. Delly Maulana, M.PA. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberi masukan pada materi penelitian dan tata cara penyusunan proposal TAPM ini.
5. Dr. Obed Bida, S.Sos., M.PA. selaku dosen pembimbing II yang sudah memberi bimbingan tentang tata cara penulisan TAPM sesuai pedoman penulisan yang berlaku.

6. Pihak UPBJJ UT Samarinda dan Pokjar Merdeka Tanah Grogot yang telah membantu memfasilitasi terlaksananya penyusunan TAPM ini.
7. Rekan-rekan Mahasiswa satu grup bimbingan, serta rekan kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang tidak dapat disebutkan semua namanya di sini, yang telah memberi semangat, dukungan, dan bantuan data kepada penulis.
8. Para informan dari berbagai Instansi dan OPD di Kabupaten Paser, atas dukungan data dan informasi yang sangat diperlukan untuk meyelesaikan TAPM ini.
9. Kedua Orang Tua (Bapak Romansyah dan Ibu Noorhasanah), Keluarga tercinta, Istri (Sabriah) dan Anak (Sabrina Alya Zhafirah) yang sudah memberikan do'a, dukungan dan pengertiannya ketika TAPM ini sedang disusun.

Tak lupa penulis sadari bahwa dalam TAPM ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sendiri. Untuk itu kritik dan saran akan penulis terima guna perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Samarinda, Juli 2023
Penulis,

Firhansyah
NIM. 530036963

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Firhansyah
NIM	: 530036963
Program Studi	: Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir	: Banjarmasin / 10 Oktober 1982
Riwayat Pendidikan	: Lulus SD di SDN Inpres 017 Tanjung Selor pada tahun 1995. Lulus SMP di SLTP Negeri 1 Tanjung Palas pada tahun 1998. Lulus SMA di SMU Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 2001 Lulus S1 di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2008 Lulus Program Profesi Insinyur di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2020
Riwayat Pekerjaan	: Tahun 2008 s/d 2010 sebagai konsultan *freelance* di Banjarmasin dan Kabupaten Paser Tahun 2010 s/d 2014 sebagai PNS di Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser Tahun 2014 s/d 2016 sebagai PNS di Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser Tahun 2017 s/d sekarang sebagai PNS di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

Tana Paser, Juli 2023

Firhansyah
NIM. 530036963

A. Deskripsi Objek Penelitian 73
1. Gambaran Umum Kabupaten Paser 73
2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Kabupaten Paser 75
3. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana SPM Sub Bidang Air Minum 84
4. Deskripsi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum 86
B. Hasil Penelitian 89
1. Capaian DPUTR Kabupaten Paser dalam Implementasi Kebijakan SPM Sub Bidang Air Minum 89
2. Indikator dan Variabel Implementasi Kebijakan 126
C. Analisis 159
1. Kinerja Implementasi Kebijakan SPM Sub Bidang Air Minum di DPUTR Kabupaten Paser 159
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan SPM Sub Bidang Air Minum 170

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 184
A. Kesimpulan 184
B. Saran 185

DAFTAR PUSTAKA 187
LAMPIRAN 192

A. Deskripsi Objek Penelitian 73
1. Gambaran Umum Kabupaten Paser 73
2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Kabupaten Paser 75
3. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana SPM Sub Bidang Air Minum 84
4. Deskripsi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum 86
B. Hasil Penelitian 89
1. Capaian DPUTR Kabupaten Paser dalam Implementasi Kebijakan SPM Sub Bidang Air Minum 89
2. Indikator dan Variabel Implementasi Kebijakan 126
C. Analisis 159
1. Kinerja Implementasi Kebijakan SPM Sub Bidang Air Minum di DPUTR Kabupaten Paser 159
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan SPM Sub Bidang Air Minum 170

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 184
A. Kesimpulan 184
B. Saran 185

DAFTAR PUSTAKA 187
LAMPIRAN 192

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Perbedaan PP 2/2018 dengan PP 65/2005 tentang SPM 7

Tabel 1.2 Urusan Pemerintahan Wajib dan Pelayanan Dasar 8

Tabel 1.3 Target Capaian SPM Sub Bidang Air Minum Kabupaten Paser 14

Tabel 1.4 Realisasi Penerapan SPM Sub Bidang Air Minum dan Air Limbah Tahun 2019..... 15

Tabel 1.5 Realisasi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019 .. 17

Tabel 2.1 Matriks Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sendiri dengan Penelitian Terdahulu 51

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2010 dan 2020 75

Tabel 4.2 Data Penduduk Miskin Kabupaten Paser Tahun 2018-2020 76

Tabel 4.3 Data Pendidikan SD-SMA/SMK Kabupaten Paser 2018-2020 77

Tabel 4.4 Persentase Ijazah Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas 77

Tabel 4.5 Jumlah Pelanggaran/Kasus di Kabupaten Paser 2018-2020 78

Tabel 4.6 Jumlah Keluhan Kesehatan dan Kesakitan Masyarakat Kabupaten Paser (2018-2020) 78

Tabel 4.7 Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Paser (2018-2020) 79

Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser 2018-2020 (ribu rupiah) 81

Tabel 4.9 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser 2018-2020 (ribu rupiah) 81

Tabel 4.10 Komponen/Indikator Penerapan SPM 90

Tabel 4.11 Data Unit Pelayanan PDAM Kabupaten Paser 96

Tabel 4.12 Kondisi Sarana-Prasarana SPAM JP Kabupaten Paser (2021) 97
Tabel 4.13 Kondisi Sarana Prasarana SPAM BJP Kabupaten Paser 98
Tabel 4.14 Akses layanan SPAM per Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2021 105
Tabel 4.15 Capaian Akses Air Minum Kabupaten Paser Tahun 2021 105
Tabel 4.16 Target Capaian Akses Air Minum Kabupaten Paser 106
Tabel 4.17 Rencana Pembiayaan Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Tahun 2021 107
Tabel 4.18 HSPK dan ASB Kegiatan Penyediaan Air Minum Kabupaten Paser Tahun 2022 108
Tabel 4.19 Rencana Jumlah/Kapasitas Produksi SPAM JP Kabupaten Paser hingga Tahun 2038 113
Tabel 4.20 Program/Kegiatan dan Pendanaan SPAM JP dan BJP Kabupaten Paser (2016-2026) 115
Tabel 4.21 Form Penyusunan Rencana Pemenuhan 117
Tabel 4.22 Standar Kegiatan Pelayanan SPAM 119
Tabel 4.23 Komponen, Indikator, Target Pelayanan dan Output Kegiatan SPAM 121
Tabel 4.24 Anggaran Kegiatan SPAM DPUTR Kab. Paser (2019-2021) 124
Tabel 4.25 Anggaran Kegiatan SPAM DPKP2 Kab. Paser (2019-2021) 125
Tabel 4.26 Jumlah dan Kompetensi Pegawai Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser 131
Tabel 4.27 Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor Bidang Cipta Karya DPUTR Kab. Paser 133

Tabel 4.28 Rencana Target Anggaran DPUTR Kabupaten Paser (2021-2026). 135
Tabel 4.29 Data jumlah pelanggan dan pengaduan di Perumdam Tirta Kandilo 137
Tabel 4.30 Kondisi Laba/Rugi Perumdam Tirta Kandilo 137
Tabel 4.31 Data Kinerja Perumdam Tirta Kandilo 137
Tabel 4.32 Alokasi dan Realisasi Anggaran DPUTR Kab. Paser (2016-2020). 152
Tabel 4.33 Disposisi Pelaksana Kebijakan SPM Sub Bidang Air Minum di Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser 158
Tabel 4.34 Tinjauan Kinerja Implementasi Kebijakan SPM Sub bidang Air Minum di DPUTR Kabupaten Paser 164
Tabel 4.35 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan SPM Sub bidang Air Minum di Kabupaten Paser 180

Tabel 4.28 Rencana Target Anggaran DPUTR Kabupaten Paser (2021-2026). 135

Tabel 4.29 Data jumlah pelanggan dan pengaduan di Perumdam Tirta Kandilo 137

Tabel 4.30 Kondisi Laba/Rugi Perumdam Tirta Kandilo 137

Tabel 4.31 Data Kinerja Perumdam Tirta Kandilo 137

Tabel 4.32 Alokasi dan Realisasi Anggaran DPUTR Kab. Paser (2016-2020). 152

Tabel 4.33 Disposisi Pelaksana Kebijakan SPM Sub Bidang Air Minum di Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser 158

Tabel 4.34 Tinjauan Kinerja Implementasi Kebijakan SPM Sub bidang Air Minum di DPUTR Kabupaten Paser 164

Tabel 4.35 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan SPM Sub bidang Air Minum di Kabupaten Paser 180

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Sampel Survey Susenas BPS Kabupaten Paser 191

Lampiran 2 - Pedoman Wawancara 193

Lampiran 3 - Transkrip Hasil Wawancara 199

Lampiran 4 - Dokumentasi Wawancara 211